

## **SRATEGI DINAS SOSIAL KOTA BANDAR LAMPUNG**

### **DALAM MENANGULANGI PENGEMIS DIJALANAN**

Dosen pengempu: Intan Fitri Meutia S.A.N., M.A., Ph.D



Disusun oleh

Sabrini Hayati

(2216041129)

## **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 PENELITIAN TERDAHULU**

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan acuan dan sebagai bahan perbandingan, supaya tidak terjadi pengulangan hasil penelitian baik dalam bentuk buku, jurnal, maupun lainnya, sehingga dengan ini peneliti menguraikan karya ilmiah atau skripsi yang sama terkait strategi dinas sosial dalam menanggulangi pengemis dijalanan. Berikut hasil-hasil penelitian terdahulu.

1. Implementasi Strategi Dinas Sosial Dalam Menangani Pengemis Di Kota Tangerang (Aji Dewantoro, 2019).

Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di

muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Mereka ini hidup dengan cara berpindah tempat atau ada juga yang bergelandangan di pinggiran jalan maupun di tempat-tempat yang kumuh sekalipun. Keberadaan pengemis di perkotaan sangat meresahkan masyarakat, selain mengganggu aktifitas masyarakat di jalan raya, mereka juga merusak keindahan kota. Oleh sebab itulah, apabila masalah pengemis tidak segera mendapatkan penanganan, maka dampaknya akan merugikan diri sendiri, keluarga, masyarakat serta lingkungan sekitarnya.

Ada beberapa dampak adanya pengemis yang paling menyita perhatian adalah terganggunya ketertiban lingkungan, meningkatnya tindakan kriminal, bertambahnya angka pengangguran, serta image daerah kota yang terkesan kumuh dan tidak tertata dengan baik. Dan tidak sedikit kasus kriminal yang dilakukan oleh mereka, seperti mencopet bahkan mencuri dan lain-lain. Hal tersebut sudah terjadi di beberapa daerah yang ada di Kota Tangerang seperti di daerah Tangerang.

Terkait hal tersebut banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang untuk menangani mereka, seperti Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 yakni pasal 16 ayat 1 mengenai setiap orang dilarang memberi uang dan/atau barang kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di jalanan umum, yang diharapkan dapat membuat jera para pengemis karena tidak ada yang memberi dan juga dengan pembagian makanan untuk keluarga miskin, sampai dengan operasi penggarukan, yaitu metode pengangkutan dan pemindahan paksa para pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial. Pada kenyataannya, upaya-upaya tersebut kurang efektif dan bahkan dinilai tidak mampu mengendalikan laju pengemis yang tiap tahun semakin menjamur.

Untuk mengatasi pengemis, pemerintah Kota Tangerang mengutus Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk merazia semua pengemis yang ada diseluruh sudut Kota Tangerang, untuk kemudian dijaring dan ditampung oleh Dinas Sosial Kota Tangerang. Hal ini bertujuan untuk membersihkan kota dari pengemis, serta berupaya untuk memberikan penyadaran kepada mereka..

## 2. Peran Dinas Sosial Dalam Membina Pengemis Dan Gelandangan Di Kota Pekanbaru (Hafiz Saputra Hasan,2020)

Dalam era globalisasi Dan krisis yang melanda Negara republik Indonesia mengakibatkan meningkatnya masalah kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat sehingga menyebabkan meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ). Gelandangan dan Pengemis ( Gepeng ) merupakan istilah yang digunakan untuk menunjuk seseorang yang hidupnya menggelandang, meminta minta tanpa memiliki tempat tinggal secara tetap. Gelandangan dan Pengemis boleh dikatakan bagaikan dua keping mata uang yang tidak terlalu jauh dalam hal perbedaan, karena keduanya secara fungsional bisa terjadi dalam saat yang bersamaan. Gelandangan bisa sekaligus menjadi pengemis, demikian pula pengemis bisa menjadi gelandangan. Gepeng menjalani hidupnya dengan mengharap belas kasihan dari orang lain dengan cara mengemis atau mengamen. Gepeng mempunyai tempat tinggal di kolong jembatan, stasiun kereta api dan membangun gubuk liar di tepi sungai yang menyebabkan pencemaran lingkungan sehingga menimbulkan masalah kesehatan dan keamanan lingkungan masyarakat.

Dinas Sosial bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpo PP) Kota Pekanbaru gencar melakukan razia terhadap orang gila dan gelandangan. Razia yang dilakukan sejak dua minggu terakhir berbuah hasil. Sebanyak 10 orang diduga gila dan gelandangan berhasil diamankan petugas. Razia dilakukan di sejumlah wilayah yang kerap dijadikan tempat mangkal anak jalanan dan tempat berkeliarannya orang gila, seperti di Pasar kiran dan Pasar Porong.

Mereka dapat ditemui diberbagai pertigaan, perempatan, lampu merah dan tempat umum, bahkan di kawasan pemukiman, sebagian besar dari mereka menjadikan mengemis sebagai profesi. Hal ini tentu sangat mengganggu pemandangan dan meresahkan masyarakat. Penyebab dari semua itu antara lain adalah jumlah pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang memadai dan kesempatan kerja yang tidak selalu sama. Disamping itu menyempitnya lahan pertanian di desa karena

banyak digunakan untuk pembangunan pemukiman dan perusahaan atau pabrik. Keadaan ini mendorong penduduk desa untuk berurbanisasi dengan maksud untuk merubah nasib, tapi sayangnya, mereka tidak membekali diri dengan pendidikan dan keterampilan yang memadai. Sehingga keadaan ini akan menambah tenaga yang tidak produktif dikota. Akibatnya, untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka bekerja apa saja asalkan mendapatkan uang termasuk meminta-minta (mengemis). Demi untuk menekan biaya pengeluaran, mereka memanfaatkan kolong jembatan, stasiun kereta api, emperan toko, pemukiman kumuh dan lain sebagainya untuk beristirahat, mereka tinggal tanpa memperdulikan norma sosial. Hidup bergelandangan tidak memungkinkan orang hidup berkeluarga, tidak memiliki kebebasan pribadi, tidak memberi perlindungan terhadap hawa panas ataupun hujan dan hawa dingin, hidup bergelandangan akan dianggap hidup yang paling hina diperkotaan. Keberadaan gelandangan dan pengemis (gepeng) di perkotaan sangat meresahkan masyarakat, selain mengganggu aktifitas masyarakat di jalan.

### 3. Penanganan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Malang Perspektif Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 ( Himami Firdaus, 2020)

Indonesia merupakan Negara berkembang yang mengalami permasalahan sosial di lingkungan masyarakat. Berdasarkan data yang dihimpun oleh badan pusat statistika, jumlah penduduk miskin di indonesia mencapai 28,28 juta jiwa atau sekitar 11,25% dari jumlah keseluruhan penduduk di indonesia. Kemiskinan yang terjadi di indonesia disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan satu sama lain. Faktor penyebab kemiskinan tersebut antara lain memiliki keterbatasan baik secara fisik maupun mental, pendidikan yang rendah, tidak mempunyai keterampilan untuk berusaha, dan kurang tersedianya lapangan kerja. Berdasarkan faktor tersebut, dapat dikatakan bahwa permasalahan kemiskinan yang terjadi di indonesia erat kaitannya penduduknya tidak bekerja atau menganggur dan sebaliknya penduduk yang tidak bekerja disebabkan karena kemiskinan, yang mana penduduk tersebut tidak mampu mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan dan keterampilan secara maksimal sebagai modal mendapatkan

pekerjaan. Dalam persaingan untuk mendapat pekerjaan, terdapat orang-orang yang tersingkirkan yang berdampak pada terjadinya pengemis. Orang-orang yang tersingkirkan inilah yang kemudian mencoba segala upaya untuk tetap bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya entah menjadi pengemis, pengamen, gelandangan, pemulung dan lain-lain. Pada umumnya mereka berusia muda dan masih produktif namun mereka kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Sesuai kemajuan perkembangan pembangunan bidang kesejahteraan sosial menunjukkan bahwa kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat semakin meningkat, namun pengelolaan dan pelayanannya belum semua dilaksanakan secara profesional.

Pemerintah telah bertekad untuk menanggulangi pengemis yang telah tersebar di seluruh tanah air. Sesuai dengan amanat Undang-undang dasar 1945 pasal 34 bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara” pemerintah pusat sangat berharap kepada pemerintah daerah dan masyarakat di sekitar untuk ikut serta memprakarsai secara langsung tanpa harus menunggu kebijakan dan komando program-program formal dari pemerintah pusat.

Semakin banyaknya orang-orang yang tidak mendapat kesempatan hidup secara layak, anak-anak jalanan yang tinggal di rumah-rumah kardus dan dibawah kolongan jembatan serta pengangguran-pengangguran baru yang jumlahnya meningkat tajam, telah menggambarkan betapa parahnya kondisi kemiskinan yang ada di Indonesia pada saat ini. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang bersifat global yang dihadapi setiap bangsa, tidak ada satupun Negara di dunia yang bebas dari kemiskinan. Kemiskinan merupakan problema kemanusiaan yang menghambat kesejahteraan dan ketidakberdayaan yang dialami seseorang.

## **2.2 TINJAUAN UMUM**

### **2.1 Tinjauan Umum Strategi**

Menurut Jauch dan Glueck (2000) menyatakan bahwa strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan perusahaan dengan tantangan lingkungan dan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan.

Dan menurut Hamel dan Prahalad yang dikutip Rangkuti (2002) “Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya”.

Berdasarkan berbagai definisi tentang strategi yang dikemukakan oleh para ahli maka dapat disimpulkan bahwa strategi adalah rumusan perencanaan untuk mencapai tujuan jangka panjang melalui pengintegrasian keunggulan dan alokasi sumber daya yang ada di perusahaan.

## **2.2 Tinjauan Umum Dinas Sosial**

Dinas Sosial merupakan satuan pelaksana pelayanan sosial kepada masyarakat di bawah wewenang Kementerian Sosial Republik Indonesia yang merupakan kementerian yang melayani pemenuhan kebutuhan sosial dan menangani permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Dinas Sosial adalah perangkat yang melaksanakan penanganan masalah di bidang sosial dalam cangkupan pemerintah daerah dan dipimpin oleh Kepala Dinas yang memiliki kedudukan dan tanggung jawabnya secara langsung kepada Gubernur melalui Sekertaris Daerah.

Berdasarkan fungsinya dinas sosial sebagai penyelenggarakan fungsi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, serta penanganan masalah fakir miskin di masyarakat. Dinas Sosial memiliki peran yang vital di masyarakat terutama terhadap penanganan-penanganan masalah sosial yang terjadi di masyarakat.

## **2.3 Tinjauan Umum Menanggulangi**

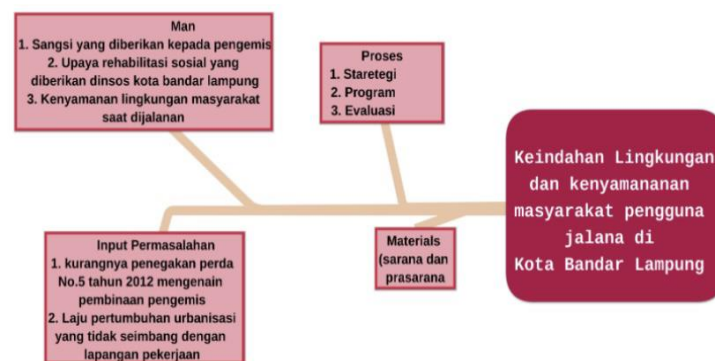
Menurut KBBI (2013), menanggulangi berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Menanggulangi adalah upaya yang dilaksanakan untuk

mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah dengan kata lain upaya menanggulangi dapat dilakukan secara preventif dan refresif.

## 2.4 Tinjauan Umum Pengemis

Definisi pengemis menurut Cornelius (2017). Pengemis adalah prilaku yang dijalankan oleh seseorang untuk mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di muka umum dengan memanfaatkan kondisinya agar mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Pengemis adalah tindakan yang senantiasa dilakukan dengan sengaja agar mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup, bentuk tidak sosial ini dijalankan oleh seorang anak, ataupun orang dewasa sekalipun yang tujuannya ialah demi mendapatkan untung.

## 2.3 KERANGKA PIKIR



Gambar 1. Kerangka Pikir

## **BAB III**

### **Metode Penelitian**

#### **3.1. Pendekatan dan metode penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian ini dipilih karena peneliti bertujuan untuk menguraikan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada. Keadaan ini didapat dari observasi, wawancara, serta kebijakan dari dinas sosial kota bandar lampung dan juga faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengimplementasian strategi tersebut.

#### **3.2. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan metode observasi dimana peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian, melakukan wawancara terhadap pihak yang terkait dengan pembahasan penelitian dan melakukan studi pustaka yang berhubungan dengan teori-teori terkait dengan tema penelitian.

#### **3.3. Fokus penelitian**

1. Peleksaan strategi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam upaya menanggulangi pengemis dijalanan yang dapat ditinjau melalui rahazia, adanya sangsi, serta rehabilitasi yang diberikan
2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab pernasalahan pengemis yang masih sangat tinggi

#### **3.4. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah dimana peneliti melakukan penelitian, dalam penelitian ini lokasi menjadi sumber informasi yang dapat mengungkap dan menggambarkan fenomena yang terjadi serta informasi yang diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian mengenai stategi dinaas sosial dalam menanggulangi pengemis di kita bandar lampung. Lokasi

dalam penelitian ini adalah tempat-tempat keramaian seperti lampu merah, pasar tradisional, terminal dan tempat umum lainnya. Gambaran kejadian tersebut sering peneliti perhatikan sehari-hari banyak di Pasar Way Halim, Pasar Tengah dan Lampu Merah Bypass (Sukrame). Penelitian ini ditentukan dengan sengaja (purposive), alasan peneliti mengambil sampel lokasi tersebut karena wilayah tersebut sangat strategis bagi pengemis dalam melakukan aktivitas kesehariannya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Anasiru, Ronawaty. 2011. Implementasi Model-Model Kebijakan Penanggulangan Anak Jalanan di Kota Makassar. Sosiokonsepia, Vol. 16 No. 02

Bagong, Suyanto. 2005. Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Batubara, Hambali. 2010. Penelitian Profil Anak Jalanan di DKI Jakarta. Jakarta: PT. Grasindo

Departemen Sosial. 2006. Modul Pelayanan Sosial Anak Jalanan, Jakarta:

Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Dun, William. 2003. Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada

Engkus. 2019. Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Jalanan di Kota Bandung. Open Journal Systems. Vol.14 No.3

